

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

1. Helda Yanti (2022) “Pemberdayaan Melalui Kelompok Tani Budi Karya Di Desa Ampukung Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini bahwa di pemberdayaan petani di Desa Ampukung belum tercapai dengan baik salah satunya dalam memotivasi/mendorong keikutsertaan masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dilakukan karena tidak adanya agenda atau jadwal kegiatan yang tetap sehingga pelaksanaan dilakukan secara mendadak yang mengakibatkan masyarakat tidak bisa ikut serta karena tidak dapat meninggalkan pekerjaan yang sedang dilakukan. Faktor Penghambat keberhasilan peningkatan pemberdayaan masyarakat di Desa Ampukung adalah waktu pelaksanaan kegiatan pemberdayaan atau penyuluhan pertanian yang tidak terjadwal yang diadakan mendadak, pendidikan masyarakat yang rendah sehingga sulit untuk menjelaskan mengenai kegiatan pemberdayaan.
2. Ninin Sintia (2020) “Pemberdayaan Masyarakat Melalui GAPOKTAN Panca Tani Desa Mlaten Kecamatan Wijen Kabupaten Demak”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis kualitatif deskriptif dimana penelitian ini pelaksanaannya digunakan kurang lebih melalui beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, studi

dokumentasi. Hasil penelitian ini bahwa pemberdayaan masyarakat oleh Gapoktan berhasil mengurangi penduduk miskin, berkembangnya usaha peningkatan pendapatanyang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia dan meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lainnya.

B. Tinjauan Teoritis

1. Konsep Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan mencakup dua pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan. Istilah administrasi diambil dari kata “ad” dan “ministro”, Ad mempunyai arti “kepada” dan ministro berarti “melayani” sehingga administrasi diartikan sebagai pelayanan atau pengabdian terhadap subjek tertentu. Selain itu, kata administrasi juga berasal dari bahasa Belanda yaitu administrase yang artinya kegiatan penyusunan dan pencatatan. Kegiatan ini mencakup tulis-menulis, mengirim dan menyimpan keterangan, dan dikaitkan pula dengan aktivitas administrasi perkantoran yang hanya merupakan salah satu bidang dari aktivitas administrasi sebenarnya. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi: catat-mencatat surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Administrasi dalam arti luas adalah seluruh proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam mencapai

tujuan dengan cara memanfaatkan sarana prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna.

Menurut Sicephen P. Robbins dikutip dalam Sjansiar Sjamsuddin Indradi (2016:9) mengatakan bahwa administasi adalah keseluruhan proses dari aktivitas-aktivitas pencapaian tujuan secara efisien dengan melalui orang lain.

Menurut The Liang Gie dalam Sjamsiar Sjasuddin Indra (2016:8) mengatakan bahwa administrasi yaitu segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap kerja pokok yang dilakukan oleh kelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, dalam rangkaian kegiatan yang digolongkan ke dalam administrasi mencakup adanya karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Dilakukan oleh sekelompok orang (dua orang atau lebih) secara rasional
- b. Administrasi merupakan suatu proses kerja sama
- c. Dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Sondang P. Siagian dalam Ali Abdul Wakhid (2016: 51-53) Administrasi pembangunan adalah "Rangkaian usaha dalam mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu bangsa atau negara untuk mencapai modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Definisi sederhana di atas apabila disimak secara cermat, akan muncul ke permukaan paling sedikit tujuh ide pokok, yaitu:

1. Pembangunan merupakan suatu proses

Pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahapan-tahapan yang di satu pihak bersifat independen akan tetapi di pihak lain merupakan "bagian" dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir (*never ending*). Banyak cara yang dapat digunakan untuk menentukan pentahapan tersebut, seperti berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan.

2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan.

Dengan perkataan lain, jika dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat kegiatan yang kelihatannya seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak ditetapkan secara sadar dan hanya terjadi secara sporadis atau insidental, kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembangunan.

3. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, sedang dan jangka pendek.

Merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu di masa depan. Perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok dalam administrasi atau manajemen pembangunan.

4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan.

Pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan suatu negara, bangsa untuk berkembang dan tidak sekadar mampu mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan eksistensinya. Perubahan mengandung makna bahwa suatu negara bangsa harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari satu jangka waktu ke jangka waktu yang lain, terlepas apakah situasi yang berbeda itu dapat diprediksikan sebelumnya atau tidak.

5. Pembangunan mengarah kepada modernitas

Modernitas di sini diartikan antara lain sebagai cara hidup baru yang lebih baik dari sebelumnya, cara berpikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel. Walaupun demikian, perlu diingatkan bahwa konsep modernitas tidak identik dengan "Cara hidup gaya Barat", Setiap negara bangsa yang modern harus tetap mempertahankan jati dirinya yang bersumber dari nilai-nilai yang dipandang luhur oleh negara bangsa yang bersangkutan. Bahwa ada aspek-aspek nilai tersebut yang memerlukan penyesuaian karena tuntutan zaman, itu pun harus diakui dan dijadikan masukan dalam merumuskan strategi pembangunan yang akan ditempuh.

6. Modernitas yang ingin dicapai bersifat multi dimensional.

Artinya modernitas tersebut mencakup seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dapat mengejawantah di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.

7. Pembangunan ditujukan pada usaha untuk pembinaan bangsa dan negara.

Tujuannya adalah supaya bangsa yang bersangkutan semakin kokoh fondasinya dan semakin mantap keberadaannya sehingga menjadi negara bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia karena mampu menciptakan situasi yang membuatnya berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara bangsa lain di dunia.

Menurut Afifuddin dalam Muhammad Sawir (2021:25) fokus analisis administrasi pembangunan adalah proses pembangunan yang diselenggarakan oleh suatu bangsa dalam rangka pencapaian tujuan dan cita-cita negara atau bangsa tertentu, termasuk cara-cara ilmiah yang dipergunakan dalam pemecahan masalah, menghadapi tantangan, memanfaatkan peluang dan menyingkirkan ancaman. Disiplin ilmu administrasi pembangunan memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang lain, yaitu:

1. Orientasi administrasi pembangunan lebih mengarah kepada usaha perubahan-perubahan keadaan yang dianggap lebih baik.
2. Administrasi pembangunan melakukan perbaikan dan penyempurnaan administrasi dikaitkan dengan aspek perkembangan di bidang-bidang lain seperti ekonomi, sosial, politik dan lain-lain

Dari definisi tersebut terlihat bahwa dalam upaya dan kegiatan pembangunan merupakan "upaya nasional". Artinya dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah saja, akan tetapi masyarakat harus ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan tersebut.

2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan maupun pemberdayaan masyarakat telah cukup lama kita kenal, seiring dengan semakin meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia, yang tidak hanya menimpa masyarakat di

pedesaan tapi juga masyarakat perkotaan. Telah cukup banyak program pemberdayaan masyarakat yang diluncurkan pemerintah maupun oleh organisasi sosial/kemasyarakatan dan organisasi profesi, sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan, namun belum semuanya bisa berhasil dengan baik.

Pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang mengandung arti “kekuatan”, dan merupakan terjemahan dan istilah dalam bahasa Inggris “*empowerment*”, sehingga dapat dijabarkan bahwa pemberdayaan mengandung arti memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum mempunyai daya/kekuatan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari seperti makan, pakaian/sandang, rumah/papan, pendidikan, kesehatan. Memberikan kekuatan atau *power* kepada orang yang kurang mampu atau miskin atau *powerless* memang merupakan tanggungjawab pemerintah, namun seharusnya mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, terutama masyarakat itu sendiri yang menjadi kelompok sasaran yaitu dengan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan setiap program/kegiatan pemberdayaan.

Menurut Prijono, S. Onny dan Pranarka, A.M.W dalam Saifuddin Yunus dan Suadi Fadli (2017:3) pemberdayaan merupakan proses penguatan individu-individu atau masyarakat supaya mereka berdaya. Mendorong atau memotivasi mereka agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan dalam menentukan pilihan hidupnya. Pemberdayaan dapat dikatakan sebagai proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat daya kelompok lemah dalam masyarakat.

Usman (Andreas dan Enni Savitri 2016: 23-24) menjelaskan bahwa pemberdayaan (*empowerment*) dapat didefinisikan sebagai “Upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh

masyarakat”. Dalam konteks ini, secara implisit pemberdayaan mengandung unsur “Partisipasi” yang seharusnya dimunculkan dari dalam diri masyarakat itu sendiri.

Mardikanto dan Soebiato (Hendrawati Hamid, 2018:10) mengemukakan bahwa, pemberdayaan sebagai sebuah proses adalah merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk didalamnya individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan merujuk pada kemampuan untuk berpartisipasi memperoleh kesempatan dan mengakses sumber daya dan layanan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas hidup (baik secara individual, kelompok dan masyarakat dalam arti yang luas). Melalui pemahaman tersebut, pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses yang terencana untuk meningkatkan *skala/up grade* utilitas dari objek yang diberdayakan.

Pemberdayaan masyarakat, dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif, untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki.

Menurut Jim Ife, konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dua konsep pokok yakni: konsep *power* (daya) dan konsep *disadvantaged* (ketimpangan). Pengertian pemberdayaan dapat dijelaskan dengan menggunakan empat perspektif yaitu: *perspektif pluralis, elitis, strukturalis dan post-strukturalis*.

Robert Chambers (Hendrawati Hamid 2018:10) seorang ahli yang pemikiran dan tulisannya banyak dicurahkan untuk kepentingan upaya pemberdayaan masyarakat berpendapat bahwa, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat *people centered* (berpusat pada manusia), *Participatory* (partisipatif), *empowering* (memberdayakan) and *sustainable* (berkelanjutan). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya akhir-akhir ini lebih banyak dikembangkan sebagai upaya untuk mencari alternatif terhadap konsep pertumbuhan pada masa yang lalu.

Pada hakekatnya, pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditujukan pada individual, tetapi juga secara berkelompok, sebagai bagian dari aktualisasi eksistensi manusia. Untuk itu, manusia/masyarakat dapat dijadikan sebagai tolak ukur secara normatif, yang menempatkan konsep pemberdayaan masyarakat sebagai suatu bagian dari upaya untuk membangun eksistensi masyarakat secara pribadi, keluarga, dan bahkan bangsa sebagai aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk itu dalam kegiatan, pemberdayaan masyarakat dibutuhkan adanya pengenalan terhadap hakekat manusia yang akan memberikan sumbangan untuk menambah wawasan dalam menerapkan berbagai konsep atau program pemberdayaan kepada masyarakat.

Menurut Suharto (Hendrawati Hamid 2018:11), pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, tetapi juga bebas dari kelaparan, kebodohan dan kesakitan.
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan masyarakat dapat meningkatkan pendapatannya memperoleh barang-barang dan jasa yang dibutuhkan dan berkualitas.
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (ditindas oleh struktur sosial yang tidak berlaku adil). Untuk melengkapi pemahaman tentang pemberdayaan

perlu diketahui tentang konsep kelompok lemah dan penyebab ketidakberdayaan yang mereka alami.

Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya, seperti kelompok:

- a. Lemah secara struktural, yaitu lemah secara kelas (masyarakat yang kelas sosial ekonominya rendah), gender maupun etnis (kelompok minoritas), yang mendapatkan perlakuan kurang/ tidak adil dan diskriminasi.
- b. Lemah secara khusus, yaitu seperti manula, anak-anak, remaja, penyandang cacat, gay-lesbian, masyarakat terasing.
- c. Lemah secara personal, yaitu orang-orang yang mengalami masalah pribadi atau keluarga (Suharto, Hendrawati Hamid, 2018:12).

Upaya dalam pemberdayaan masyarakat menurut Friedmann (Sri Handini, 2021: 13-14) dapat dikaji dalam tiga aspek yaitu:

1. *Enabling*, yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Asumsinya adalah pemahaman bahwa setiap orang, setiap masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan artinya tidak ada orang atau masyarakat tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat mengembangkannya. serta upaya untuk mengembangkannya.
2. *Empowering*, yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya.
3. *Protecting*, yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur penting.

Faktor lain yang menyebabkan ketidak-berdayaan masyarakat di luar faktor ketiadaan daya (*powerless*) adalah faktor ketimpangan. Ketimpangan yang seringkali terjadi di masyarakat meliputi:

- a. Ketimpangan struktural yang terjadi di antara kelompok primer, seperti: perbedaan kelas seperti antara orang kaya dengan orang miskin dan antara buruh dengan majikan; ketidaksetaraan gender; perbedaan ras maupun perbedaan etnis yang tercermin pada perbedaan antara masyarakat lokal dengan pendatang dan antara kaum minoritas dengan mayoritas.
- b. Ketimpangan kelompok akibat perbedaan usia, kalangan tua dengan muda, keterbatasan fisik, mental dan intelektual, masalah gay-lesbi, isolasi geografis dan sosial (ketertinggalan dan keterbelakangan).
- c. Ketimpangan personal akibat faktor kematian, kehilangan orang-orang yang dicintai, persoalan pribadi dan keluarga.

Oleh karena itu, kegiatan merancang, melaksanakan dan mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat akan berjalan efektif jika sebelumnya sudah dilakukan investigasi terhadap faktor-faktor yang menjadi akar permasalahan sosial. Dalam konteks ini, perlu diklarifikasi apakah akar penyebab ketidak-berdayaan berkaitan dengan faktor kelangkaan sumber daya atau faktor ketimpangan, ataukah kombinasi antara keduanya.

Berdasarkan pengalaman, upaya memberdayakan kelompok masyarakat yang lemah dapat dilakukan dengan tiga strategi. Pertama, pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan yang dilaksanakan

dengan membangun atau mengubah struktur dan lembaga yang bisa memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Kedua, pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik yang dilakukan perjuangan politik dan gerakan dalam rangka membangun kekuasaan yang efektif. Ketiga, pemberdayaan melalui pendidikan dan penumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek yang cukup luas. Upaya ini dilakukan dalam rangka membekali pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat lapis bawah dan meningkatkan kekuatan mereka.

3. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Penekanan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) ditekankan pada tiga tahapan proses pelaksanaan, yaitu:

- a. Proses pemberdayaan masyarakat yang berupaya memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat supaya individu dalam masyarakat menjadi lebih berdaya.
- b. Proses memotivasi individu agar mempunyai kemampuan untuk menentukan pilihan hidupnya melalui proses musyawarah dan mufakat.
- c. Memberikan ruang bagi masyarakat untuk berekspresi sesuai kemampuannya melalui seni dan budaya serta olah raga yang didasarkan pada proses pendidikan yang demokrasi.

Endah dalam Helena Thatcher Pakpahan dkk. (2024:17-18), menjelaskan bahwa Pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan

adalah tantangan utama dimana tahap awal proses yang akan memakan waktu untuk mencari tahu bagaimana hidup tanpa batas, harmoni dengan alam. Pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan kadang-kadang tampak seperti tugas yang hebat, namun dapat membuat pekerjaan para perencana dan profesional pengembangan masyarakat berpotensi sangat bermanfaat dan bermakna. Salah satu komunitas yang memahami pentingnya mengintegrasikan, keseluruhan pengembangan komunitas adalah Santa Monica, California. Mulai tahun 1994, Dewan Kota mengadopsi Program Kotaberlanjutan untuk mengatasi masalah dan kekhawatiran keberlanjutan. Pada tahun 2003, rencana kota berkelanjutan diadopsi dan dibangun berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan fokus pada delapan bidang tujuan, yaitu: (1) Konservasi sumber daya, (2) Lingkungan dan kesehatan masyarakat, (3) Transportasi, (4). Pembangunan ekonomi, (5). Pendidikan dan partisipasi masyarakat.

Pelaksanaan pemberdayaan ada tahapan yang harus dilakukan

Tahap-tahap pemberdayaan masyarakat terbagi menjadi 3 yaitu :

1. Tahap penumbuhan kesadaran masyarakat sebagai sumber pemberdayaan, dengan menyadarkan bahwa masyarakat memiliki potensi yang bisa ditingkatkan.
2. Tahap kapitalisasi dapat diraih bila masyarakat memiliki kemampuan untuk menerima daya. Tahap ini disebut juga sebagai pengembangan kapasitas terdiri dari manusia, organisasi, dan nilai.
3. Tahap pemberian daya, dalam hal ini masyarakat diberi daya, wewenang, atau kesempatan untuk mendapatkan kemandiriannya. Pemberian daya diselaraskan dengan keterampilan setiap warga masyarakat.

Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat dikaitkan dengan dua kelompok yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang melakukan pemberdayaan (pemerintah daerah, pemerintah desa dan lembaga swadaya masyarakat) yang mempunyai kepedulian dalam meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat.

4. Konsep Kelompok Tani

Kelompok tani adalah perkumpulan yang beranggotakan para petani desa tersebut. Walaupun tidak semua petani didesa mengikuti kegiatan ini. Ketua kelompok tani dipilih dari salah seorang petani yang

dianggap memiliki pengetahuan dan wawasan yang dianggap luas. Ketua kelompok petani yang terpilih diharapkan mampu menjalankan tugas dan kewajibannya seperti mengkoordinasikan kegiatan gotong-royong untuk pengolahan lahan anggota kelompok tani secara bergantian, mengkoordinasikan penjualan hasil produksi dan melakukan hubungan dengan pihak penyuluh maupun dinas pertanian.

Kelompok tani sebagai kumpulan para petani yang tumbuh berdasarkan keakraban dan keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha (Departemen Pertanian Republik Indonesia 1997) Fungsi utama kelompok tani pada dasarnya adalah sebagai wahana dalam proses belajar-mengajar, wahana bekerjasama, wahana berproduksi.

Adapun tujuan kelompok tani sebagai berikut:

- a. Membentuk para anggota kelompok tani mandiri dan berdaya.
- b. Untuk memanfaatkan secara baik (*best*) semua sumber daya yang tersedia.
- c. Untuk memecahkan permasalahan yang ada pada anggota kelompok tani dalam bidang pertanian.
- d. Membantu para anggota kelompok tani dan memberikan pengetahuan kepada para anggota yang tidak tahu menjadi tahu.

Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor: 273/Kpts/OT.160/4/2007 menyebutkan bahwa kelompok tani yang telah tumbuh harus berfungsi, sehingga dapat menjadi organisasi petani

yang kuat dan mandiri. Berfungsinya kelompok tani tidak lepas dari peran penyuluh pertanian yang bertugas di desa/kelurahan setempat.

Kelompok tani mempunyai fungsi, yaitu:

- a. Kelompok tani berfungsi sebagai unit usaha tani.
- b. Kelompok tani berfungsi sebagai unit usaha pengolahan.
- c. Kelompok tani berfungsi sebagai unit usaha sarana dan prasarana produksi.
- d. Kelompok tani berfungsi sebagai unit usaha pemasaran.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada penelitian ini berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Tani yang akan diteliti agar tidak melebar dari pembahasan diantaranya adalah Friedmann (Sri Handini, 2021:13-14) dapat dikaji dalam tiga aspek yaitu:

1. *Enabling*

Enabling yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Asumsinya adalah pemahaman bahwa setiap orang, setiap masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan artinya tidak ada orang atau masyarakat tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat serta upaya untuk mengembangkannya.

2. *Empowering*

Empowering yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya.

3. *Protecting*

Protecting yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur penting.

Gambar 2.1

Kerangka pemikiran

